

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mudjiono, *Hukum Agraria*, Yogyakarta; Liberty, 1992.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Komprehensif*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2012.

Andrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta; Sinar Grafika; 2016.

Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta; Kencana, 2003.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta; Kencana Cet.2, 2010.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta; edisi revisi, Djembatan Jilid 1, 2005.

Amin Wijaya Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Jakarta; Rineka Cipta, 1995.

Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2015.

Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: Rapika Aditama, 2013.

Siti Kurnia Rahayu, *Konsep Dan Aspek Formal Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Maria Soemardjono, *Puspita Seragkaian Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta: Andi Offset, 1982.

R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.

A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan*

Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998), Cet. 1,
Bandung : Mandar Maju.

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*,
Bandung: Mandar Maju, 2008.

Hasan Warga kusumah, *Hukum Agraria I*, Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama,
1995.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Karunika
Universitas Terbuka, 1988.

I Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional, 2014.

Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.

Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cet. I*, Jakarta;
edisi revisi, Djambatan Jilid 1, 2005.

Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: SinarGrafika, 2011.

Sudjito, *Prona Pensertipikatan tanah secara massal dan penyelesaian
sengketatanah yang bersifat strategis*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama,
Yogyakarta: Liberty, 1987.

Mudjiono, *Hukum Agraria*, Yogyakarta: Liberty, 1992.

Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta:
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Agustus 2005.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* Jakarta: Prenada Media
Group, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 Jakarta : Universitas
Indonesia,2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, Andi Offset; Yogyakarta, 1990).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta; Bandung, 2013.

Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara; Jakarta, 2003.

Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1976.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Haula Rosdiana-Edi Slamet Rianto, *Pengantar Ilmu Pajak kebijakan dan implementasi di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo persada, 2012.

B. Undang-Undang:

Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130,
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual beli Atas Tanah dan/atau Bangunan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916.

Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual beli Atas Tanah dan/atau Bangunan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916.

Makalah, Artikel dan Internet:

Herman Soesangobeng, “Filosofi Adat Dalam UUPA tentang Peningkatan Akses
Rakyat Terhadap Sumber Daya Tanah”, Makalah, Diselenggarakan oleh
Kantor Menteri Negara Agraria Bekerjasama Dengan ASPPAT, Jakarta,
1998.

Nelly Sriwahyuni Siregar, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Kuasa Mutlak Dalam
Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris/PPAT”, Magister Kenotariatan,
Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

Harian Kompas, Seluruh Tanah Indonesia Harus Sudah Bersertifikat Pada tahun
2025, Terbit 14 Mei 2018,

(<https://regional.kompas.com/read/2018/05/14/15281821/pada-2025-seluruh-tanahindonesia-harus-sudah-bersertifikat>).

Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Bhumi*, Vol.04, Nomor 01, 2008. Hal 90.

www.bpn.go.id (berita/Siaran-Pers/menteri-atrbpn-masyarakat-senang-terimasertipikat-tanah-75162).

Rani Maulida, "Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan", (<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan>)

Falzztax, 7 Karakteristik Utama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terbit 1 Juli 2021, (<https://falzztax.com/2021/07/01/7-karakteristik-utama-dari-pajak-pertambahan-nilai-ppn/>).

Badan Kebijakan Fiskal, "Mengenal Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)", (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/26/221036799823080-mengenal-pajak-penjualan-barang-mewah-ppnbm>).

Ade Syaputra Siregar, "Analisis Kinerja Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan", Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

Isdiyana Kusuma Ayu, "Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", *Legality*, Vol.27 No.1, 2019.

Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia", *Journal of Multidisciplinary Studies*, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Vol. 10, No, 02 Desember 2019.

I Gusti Ngurah, Bagus Maha Iswara, Simon Nahak dan Ni Luh Made

Mahendrawati, “Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan”, Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, 2019.

Dian Aries Mujiburohman, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, Bhumi, Vol.04, Nomor 01, 2008.

Web Terpadu Kabupaten Tangerang (<https://www.tangerangkab.go.id/index.php/bpkad/profile-skpd/show/480/53>).

Ikramullah, Peranan Pajak BPHTB untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Pidie, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, Agustus 2016.

Prayitno,RR, “Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya”, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta,2017.

Ratmono, “Perlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta. 2007.

Ismail, “Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat (Political direction of land protection of people’s land ownership)”. Jurnal RechtsVindng Vol.1 Nomor 1. 2012.

Mujiburohman, “Potensi dan permasalahan pulau sangian sebagai objek tanah terlantar”, Bhumi, Volume 1 Nomor 2, Yogyakarta, 2015.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Ahmad Munardi, An.Plt, Kepala Seksi Infrastruktur
Pertanahan BPN Kabupaten Tangerang.

Wawancara dengan Bapak Ade Hermansyah, bagian Penetapan PBB dan
BPHTB, bertempat di kantor Dispenda Kabupaten Tangerang.

Wawancara dengan Bapak Mahmuri, Warga Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka
Kabupaten Tangerang.

Wawancara dengan Bapak Jap Yung Tce, Direktur PT.Cipta Griya Propertindo.

Wawancara dengan Bapak Rana, Warga Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka
Kabupaten Tangerang.

wawancara dengan Ibu Nurlaelah, Kepala Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka
Kabupaten Tangerang.

